

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**SAMSIDAR
105730441613**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**SAMSIDAR
105730441613**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp.(0411) 866 072 Fax.(0411) 8659988 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada
Pemerintah Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Samsidar
Nomor Stambuk : 105730441613
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu 07 Oktober 2017 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA, CPAI
NIDN : 0909096703

Pembimbing II

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA
NBM. 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp.(0411) 866 072 Fax.(0411) 8659988 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Samsidar, Nim 105730441613 ini Telah Diperiksa dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor Tahun 1439 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar

Makassar, 17 Muharram 1439 H
07 Oktober 2017 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM *Abd. Rahman*
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM *Ismail*
(Dekan Fakultas Ekonomi) (.....)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM *Sultan Sarda*
(Wakil Dek. I Fak. Ekonomi) (.....)
4. Penguji
 - a. Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM, Ak, CA, CPAI *Andi Rustam*
(.....)
 - b. Saida Said, SE.,M.Ak *Saida Said*
(.....)
 - c. Hj. Naidah, SE.,M.Si *Hj. Naidah*
(.....)
 - d. Asriati, SE.,M.Si *Asriati*
(.....)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp.(0411) 866 072 Fax.(0411) 8659988 Makassar 90221

PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Samsidar

NIM : 10573 04416 13

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan Dosen Pembimbing masing-masing :

1. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPAI
2. Ismail Rasulong, SE., MM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk di penggunaan sebagai mestinya. Akhir kata saya ucapkan terimah kasih.

Makassar, 07 Oktober 2017

Yang menyatakan,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MAN JADDA WAJADA

Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil

MAN SHABARA ZHAFIRA

Siapa Yang Bersabar Pasti Beruntung

MAN SARA ALA DARBI WASHALA

Siapa Menapaki Jalan-Nya Akan Sampai Ke Tujuan

"Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit"

*Kerjakanlah,
Wujudkanlah,
Railah cita-citamu,
Dengan memulainya
Dari bekerja
Bukan hanya
Menjadi beban
Didalam impianmu*

ABSTRAK

Samsidar,2017. *Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar*, Dibimbing oleh H. Andi Rustam, dan Ismail Rasulong, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar.

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar dan metode Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau sudah efektif.

Kata kunci : *Efektivitas, Pengawasan, Keuangan Daerah*

ABSTRACT

Samsidar, 2017. Effectiveness of Regonal Financial Supervision at Makassar City Government, Guided by H. Andi Rustam, and Ismail Rasulong, Accounting Department Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar.

This study aims to determine the effectiveness of Regional Financial Supervision Performed by the Inspectorate of Makassar

The analytical method used is qualitative descriptive analysis method, used to explain the supervision of regional finance by Inspectorate of Makassar City and Effectiveness Analysis method, used to know effectiveness of regional finance supervision by Inspectorate of Makassar City, that is by using ratio comparison between realization of supervision with supervision plan specified with multiplied by 100%, to determine the level of effectiveness (yield) achieved to achieve the goal.

The result of the research shows that the supervision done by Inspectorak Makassar has been run in accordance with the standard that has been set or has been effective.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Regional Finance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta hidayahNya, penulisan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar”** dapat diselesaikan. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat Program Strata I pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penyajian Skripsi ini, penulis menyadari masih belum mendekati kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H Abd Rahman Rahim, SE. MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si, Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr.H. Andi Rustam, SE,MM.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE,MM selaku Dosen Pembimbing 2 (dua), yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dalam menyusun Skripsi ini.
6. Seluruh pegawai Kantor Inspektorat Kota Makassar yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.
7. Kedua orang tua tercinta Abd. Manaf dan Irmawati yang telah memberi segala kasih sayang, bimbingan, nasehat, doa yang tak putus-putusnya, dan menjadi motivator utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Adikku Muhammad Ramli, Muh. Asbar dan Rosnaeni yang telah banyak memberikan semangat bagi saya dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Sahabat dekat sekaligus juga kakak Muh. Ardiansyah Hasan, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta waktu yang senantiasa diluangkan untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Cica, Lisa, Nana, Lia, Ani, dan seluruh teman-teman akuntansi 9 angkatan 2013 yang telah berjuang bersama dalam melaksanakan bimbingan dan juga sektor 13 yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi dalam menyusun Skripsi ini

11. Serta seluruh pihak-pihak tanpa terkecuali yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Efektivitas.....	4
1. Pengertian Efektivitas	4

2. Faktor Penentu Efektivitas	5
B. Pengawasan	6
1. Pengertian Pengawasan.....	6
2. Proses Pengawasan	8
C. Syarat Efektivitas Pengawasan	12
D. Pengawasan Keuangan Daerah.....	14
1. Pengertian keuangan daerah	14
2. Jenis Pengawasan Keuangan Daerah	17
E. Tujuan dan Norma Pengawasan Keuangan Daerah	20
1. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah.....	20
2. Norma Pengawasan Keuangan Daerah.....	21
F. Alat Analisis Efektivitas dan Kriteria Penilaian	
Kinerja Keuangan	25
1. Alat Analisis Efektivitas	25
2. Kriteria Penilaian Kinerja Pengawasan Keuangan	
Daerah	26
G. Penelitian Terdahulu.....	27
H. Kerangka Pikir.....	37
I. Hipotesis	38
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Tempat dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Metode Pengumpulan Data	39

D. Metode Analisis	40
BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	41
A. Sejarah Singkat Inspektorat Kota Makassar	41
B. Visi dan Misi	41
C. Struktur Organisasi	42
D. Job Deskripsi.....	45
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Analisis Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Kota Makassar	52
B. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah.....	54
C. Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah	63
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	68
A. SIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Keuangan	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 5.1 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung).....	55
Tabel 5.2 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung).....	55
Tabel 5.3 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa.....	56
Tabel 5.4 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Modal	57
Tabel 5.5 Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung)	58
Tabel 5.6 Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung).....	58
Tabel 5.7 Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Barang dan	

Jasa	59
Tabel 5.8 Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Program Kerja Belanja Modal	60
Tabel 5.9 Gabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).....	61
Tabel 5.10 Gabungan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	61
Tabel 5.11 Gabungan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izizn Penelitian
2. Surat balasan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Otonomi daerah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih khusus bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Hakikat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Sehingga konsekuensi dari pelaksanaan OTODA dan tuntutan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) adalah bahwa pemerintah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung

jawab. upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, bangsa dan negara sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintahan yang *governance*, maka diharapkan kepada setiap pemerintah daerah dan lebih khusus pemerintah daerah Kota Makassar agar dalam menjalankan tugas dan wewenang pembangunan daerah utamanya yang menyangkut dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar semaksimal mungkin meningkatkan fungsi pengawasan secara efisien dan efektif dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang *governance* demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional di daerah.

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Makassar No. VII Tahun 2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat kota Makassar, maka penamaan untuk Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)

berubah menjadi Inspektorat. BAWASDA atau Inspektorat melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan pengawasan keuangan pada instansi / kantor (BUMD) milik pemerintah. pengawasan keuangan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini difokuskan pada pengawasan keuangan daerah untuk sektor belanja pada Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar Sudah Efektif”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar”.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan kepada Inspektorat kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah.
2. Sebagai referensi dan informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat, untuk mengetahui tentang kinerja Inspektorat kota Makassar, khususnya tentang pengawasan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektivitas secara etimologi berasal dari kata dasar *efektive* yang artinya berhasil, ditaati. Berikut ini kami kutip beberapa pengertian efektivitas, antara lain :

Menurut Sondang (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan Sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya dan Abdurahmat(2008:7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Kemudian Mahmudi (2005:92), dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Selanjutnya Siswanto (2007:55), dalam bukunya pengantar manajemen mengemukakan bahwa efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang

efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan. Miller (2007: 138) mengemukakan bahwa *“Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goal. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments”*. (Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.). Menurut Emerson (2005: 242), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain ketiga pendapat yang dikemukakan, pengertian efektivitas lebih khusus dan berhubungan dengan derajat keberhasilan pemerintah dalam hal urusan keuangan telah dikemukakan oleh Devas, bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan yang terukur atau nilai yang menunjukkan prestasi (keunggulan) dari suatu manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan.

2. Faktor Penentu Efektivitas

Adapun faktor penentu efektivitas kebijakan dan manajemen keuangan daerah sebagai berikut :

- 1) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana.
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
- 3) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna untuk percepatan pencapaian sasaran / tujuan.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Siagian (2010:319), adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan, dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian Sarwoto (2010:94), mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Selanjutnya George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu menurut Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Siswandi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Dari pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya tujuan dari pengawasan adalah mencakup tiga pokok yaitu untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana, mengetahui kendala-kendala juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan, dan sebagai

alat penyesuaian dan alat perbaikan dengan cara pengambilan tindakan korektif.

Merujuk pada beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan dapat menjamin kesesuaian tindakan dengan rencana kepada pencapaian tujuan organisasi.

2. Proses Pengawasan

Untuk melaksanakan pengawasan para peneliti dan praktisi telah mencoba meluruskannya dalam bentuk prosedur atau proses kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berikut beberapa pendapat, antara lain :

Menurut Belkaoui. Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) dalam Harahap S.S. bahwa langkah umum yang diikuti dalam proses pengawasan, meliputi :

- 1) Penyusunan tujuan.
- 2) penetapan standar.
- 3) pengukuran hasil kerja.
- 4) perbandingan fakta dengan standar.
- 5) perbaikan tindakan koreksi.

Kemudian menurut Williams C. (2005), bahwa proses pengontrolan terdiri dari :

- 1) Standar, merupakan dasar perbandingan untuk mengukur tingkat pelaksanaan organisasi yang beraneka ragam adalah memuaskan atau

tidak memuaskan. kriteria pertama untuk standar yang baik adalah bahwa hal tersebut harus mampu mencapai tujuan.

- 2) Perbandingan standar, adalah membandingkan prestasi aktual dengan standar-standar prestasi.
- 3) Tindakan perbaikan, adalah mengidentifikasi penyimpangan prestasi, menganalisisnya, kemudian mengembangkan, dan melaksanakan program-program untuk memperbaikinya.
- 4) Proses dinamis, bahwa pengontrolan merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Hal itu dimulai dengan prestasi nyata dan mengukur prestasi tersebut.
- 5) Pengontrolan umpan balik adalah mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidak sempurnaan prestasi setelah terjadi.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar-standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun system umpan balik informasi, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumber daya yang digunakan secara efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian langkah unsur proses pengawasan itu adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian standar dan metode pengukuran kinerja,
2. Pengukuran kinerja yang senyatanya;

3. Perbandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan penyimpangan – penyimpangan;
4. Mengadakan tindakan korektif.

Agar pengawasan efektif, maka para manajer harus menghayati reaksi manusia terhadap sistem pengawasan. Manusia tidak begitu saja menerima pengawasan yang dilakukan manajer. Reaksinya bermacam-macam menolak pengawasan terhadapnya, mempertahankan diri dari sistem pengawasan yang diterapkan padanya dan membela kinerja dan menolak sasaran kinerja yang tersirat dan tersurat pada tujuan. Hal ini makin jelas bila sumber daya terbatas dan situasi penuh tekanan. Dalam situasi seperti itu, orang cenderung untuk mempertahankan hasil kerja yang dibatasi oleh kendala sehingga pengawasan biasanya tidak dikehendaki. Stoner mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif itu haruslah memenuhi persyaratan sbb :

1. Ketepatan
2. Sesuai waktu,
3. Objektif dan kompherensif ,
4. Fokus pada titik pengawasan strategis,
5. Realistis secara ekonomis,
6. Realistis secara organisatoris
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,
8. Luwes
9. Prespektif dan operasional,
10. Dapat diterima para anggota organisasi.

Sistem pengawasan yang efektif itu seharusnya mendukung strategis dan memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran . Pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya tujuan organisasi. Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan, tidak hanya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Sistem tersebut harus dapat menunjukan mengapa terjadi penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya. Sistem pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera agar terhindar hal-hal yang tidak diharapkan, kalau perlu dengan cara-cara pengecualian. Sistem pengawasan yang efektif memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan , artinya informasi yang mudah dimengerti, sistem pengawasan harus dapat mengakomodasi situasi yang unik atau yang berubah-ubah. Sistem pengawasan harus pula dapat mengakomodasikan kapasitas seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri yang penting harus ada saling percaya, komunikasi dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan diri tercipta bila rancang bangun kerja itu jelas dan pemilihan orang yang mampu bagi pekerjaannya dilakukan dengan baik .

Sistem pengawasan harus menitik-beratkan pada pengembangan, perubahan dan perbaikan, kalau dapat sanksi dan peringatan itu diminumkan, kalau sanksi diperlukan haruslah dilaksanakan dengan hati-hati dan manusiawi, akhirnya sistem pengawasan harus jujur dan objektif artinya tidak memihak, dan satu-satunya tujuan adalah peningkatan kerja.

C. Syarat Efektivitas Pengawasan

Berkaitan dengan bagaimana efektivitasnya suatu pengawasan, maka berikut beberapa pendapat mengenai syarat-syarat agar pengawasan berjalan efektif, antara lain :

Menurut Certo Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) dalam Harahap S.S. (2005), bahwa agar pengawasan sukses, maka harus disadari bahwa :

1. Sistem kontrol tertentu hanya berlaku untuk suatu organisasi tertentu.
Artinya suatu sistem kontrol tidak akan dapat berlaku untuk semua badan/lembaga.
2. Kegiatan kontrol harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanya tujuan sektoral tetapi tujuan luas lainnya.
3. Informasi untuk maksud kontrol harus diperoleh tepat waktu.
4. Mekanisme kontrol harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi.

Kemudian menurut Duncan Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) dalam Harahap S.S. (2005), mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif, sebagai berikut :

1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan.
2. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi.
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.
4. Pengawasan itu harus fleksibel.

5. Pengawasan harus ekonomis.

Sedangkan menurut Bailey Sistem pengawasan manajemen (*management control system*) dalam Harahap S.S. (2005), mengemukakan beberapa syarat agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif ditinjau dari kacamata akuntansi, antara lain :

1. Struktur Organisasi yang baik yang dapat menunjukkan secara jelas perbedaan antara hak dan kewajiban masing-masing pejabat.
2. Sistem otorisasi dan tanggung jawab yang jelas.
3. Struktur akuntansi yang baik yang memiliki ciri :
 - 1) Adanya daftar susunan perkiraan.
 - 2) Pedoman akuntansi.
 - 3) Daftar tugas yang jelas diantara para pegawai pelaksana.
 - 4) Menggunakan perkiraan kontrol.
 - 5) Selalu memakai dokumen yang sudah diberi nomor.
 - 6) Metode lain dianjurkan untuk digunakan sepanjang dapat memperkuat sistem pengawasan.
4. Kebijakan personalia yang baik.
5. Adanya badan atau staf internal auditor yang independen dan kuat.
6. Dewan pengawasan (komisaris) yang kompeten dan aktif.

Untuk syarat-syarat pengawasan yang efektif sangat diperlukan penerapannya, adapun syarat pengawasan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dan berbagai kegiatan, maksudnya adalah teknik pengawasan harus sesuai antara lain tentang penentuan

informasi siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dan rencana.
3. Pengawasan yang efektif dilakukan minimal satu kali dalam seminggu, agar tugas yang diberikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Obyektivitas dalam melakukan pengawasan.
5. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi, seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggung jawaban jalur komunikasi dan informasi.
6. Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
7. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.
8. Pengawasan mencari apa yang tidak beres.
9. Pengawasan harus bersifat membimbing.

D. Pengawasan Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pusdiklatwas (2007), Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang

dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Mamesah (2008), dalam kutipan buku Akuntansi Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebuah hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku.

Halim (2008: 25), menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah

2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan public, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengawasan bukan tahap tersendiri dari daur anggaran walaupun pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan negara dan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu bila dikaitkan

dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan meliputi tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggung jawabannya, Dengan kata lain pengawasan anggaran sudah harus dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru berakhir pada tahap pertanggung jawaban.

2. Jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan negara dan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan menurut jenis, yaitu :

- 1) Pengawasan intern, dapat dibedakan menjadi dua :
 - a. Pengawasan intern dalam arti sempit, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam arti sempit ini adalah inspektorat jenderal departemen (IRJENDEP), inspektorat wilayah propinsi (ITWILPROP), inspektorat wilayah daerah kabupaten (ITWILKAB), inspektorat wilayah daerah kota (ITWILKOT).
 - b. Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasi pemerintahan. Fungsi pengawasan dalam arti luas ini diselenggarakan oleh badan pengawasan keuangan dan

pembangunan (BPK) dan inspektorat jenderal pembangunan (IRJENDBANG).

- 2) Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan internal dilakukan oleh BPK, Disamping itu dikenal pula pengawasan legeslatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPRD tingkat I dan tingkat II terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan.

Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, seperti yang dikutip dalam buku Riawan Tjandra yaitu mengklasifikasikan pengawasan seperti berikut ini:

1. Pengawasan dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol pengawasan yaitu:
 - 1) Kontrol Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hierarkis.
 - 2) Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga tidak

memiliki struktural didalamnya. Contohnya adalah pengawasan keuangan yang dilakukan oleh badan independen, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu, baik kontrol politik yang dilakukan oleh MPR dan DPR(D) terhadap pemerintah eksekutif dan juga kontrol reaktif yang dilakukan oleh badan peradilan.

- 3) Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan yaitu:
 - a. Pengawasan a-priori yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan dimana pengawasan ini juga dapat disebut sebagai pengawasan yang mengandung unsur preventifnya artinya pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya kekeliruan.
 - b. Pengawasan a-posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan represif yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara.
- 4) Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi yaitu:
 - a. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari aspek- aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara

berdasarkan hukum sehingga dalam melakukan setiap kegiatan harus jelas landasan hukumnya.

- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek dimana suatu tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat dan yang menjalankan negara adalah pemerintah.

Dari jenis-jenis pengawasan diatas maka yang menjadi fokus pembahasan penulis yaitu pengawasan yang dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol pengawasan sehingga akan dibahas dipembahasan selanjutnya.

Merujuk pada pengertian pengawasan dan pengertian keuangan daerah yang dikemukakan, maka pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk APBD, dapat dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah dapat menjamin kesesuaian pengelolaan APBD dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

E. Tujuan dan Norma Pengawasan Keuangan Daerah

1. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan tujuan pengawasan keuangan daerah, maka menurut Halim A. (2008), bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk

mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat pula segera dikenali, sehingga selanjutnya dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab (*accountability*)
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
5. Pengendalian

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk memantau, mengukur, dan menilai agar memastikan kepatutan dan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan APBD yang dapat disampaikan kepada kepala daerah (Bupati/Wali Kota) dan pihak terkait lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

2. Norma Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengawasan, aparat pengawas fungsional pemerintah juga memiliki norma pelaksanaan. Arti norma pemeriksaan adalah patokan, kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti

dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan dan mutu laporan pemeriksaan yang dikehendaki.

Norma pemeriksaan. Manajemen keuangan daerah dalam Munir D (2005), bahwa norma pemeriksaan terdiri dari :

1. Norma umum pemeriksaan :

- 1) Ruang lingkup pemeriksaan lengkap terhadap objek yang diperiksa, mencakup :
 - a. Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
 - b. Penilaian tentang dayaguna dan kehematan dalam menggunakan sarana yang tersedia.
 - c. Penikaian hasilguna atau manfaat yang direncanakan dari suatu program.
- 2) Pejabat yang berwenang menetapkan tugas pemeriksaan harus mempertimbangkan kebutuhan pemakai hasil pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup dari suatu pemeriksaan tertentu.
- 3) Dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, aparat individu maupun kolektif harus bertindak dengan penuh integritas dan objektivitas.
- 4) Pemeriksaan atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan, secara individu atau setidak-tidaknya secara kolektif harus mempunyai keahlian / kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

- 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan laporan, pemeriksa wajib menggunakan keahlian / kemampuan teknisnya dengan cermat.
2. Norma pelaksanaan pemeriksaan :
 - 1) Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya.
 - 2) Para pelaksana pemeriksaan harus diawasi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya.
 - 3) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan harus ditelaah dan dinilai secukupnya.
 - 4) Sistem pengendalian manajemen (SPM) harus dipelajari dan dinilai secukupnya untuk menentukan seberapa jauh sistem itu dapat diandalkan kemampuannya untuk menjamin ketelitian informasi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
 - 5) Bukti yang cukup dan relevan harus diperoleh sebagai landasan yang layak untuk menyusun pertimbangan, kesimpulan, pendapat serta saran tindak periksa.
 3. Norma pelaporan pemeriksaan :
 - 1) Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah serta kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Laporan pemeriksaan harus segera setelah selesai pekerjaan pemeriksaan dan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan tepat pada waktunya.

- 3) Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak, serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- 4) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menilai dayaguna dan kehematan serta hasilguna program, harus :
 - a. Memuat temuan dari kesimpulan pemeriksaan secara objektif serta saran tidak yang konstruktif.
 - b. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari kritik.
 - c. Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan bila ada.
 - d. Mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.
 - e. Mengemukakan penjelasan pejabat objek yang diperiksa mengenai hasil pemeriksaan.
 - f. Menyatakan informasi penting yang tidak dimuat dalam laporan pemeriksaan karena dianggap rahasia atau harus diperlukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menyatakan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan harus memuat:
 - a. Sesuai pernyataan pendapat akuntan atau kelayakan laporan secara keseluruhan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim

berlaku atau prinsip akuntansi lainnya yang diberlakukan secara khusus pada objek yang diperiksa, dan dilaksanakan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila pemeriksaan tidak dapat menyatakan pendapatnya, alasannya harus diungkapkan dalam laporan.

- b. Mengungkapkan informasi yang masih dipandang perlu oleh pemeriksa.
- c. Uraian mengenai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disertai pengaruhnya terhadap laporan keuangan objek yang diperiksa.

F. Alat Analisis Efektivitas dan Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan

1. Alat Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan suatu organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi pemerintah didalam mengemban tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Berikut dikemukakan beberapa analisis efektivitas, antara lain :

Menurut Halim A. (2008), efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil di daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

2. Kriteria Penilaian Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas, maka menurut Munir D (2005), kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C menggunakan Peraturan Mendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994, tentang kriteria penialaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan pajak, antara lain :

- 1) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif.
- 3) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 80% asampai 90% berarti cukup efektif.
- 4) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Tabel 2. I Kriteria Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri No. 690.900.327 tahun 1996.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai “Efektivitas pengawasan keuangan daerah pada pemerintah kota makassar” dapat dilihat sebagai berikut :

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novelya (2016) tentang Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian berdasarkan Kinerja Keuangan pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2011) tentang Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten ngawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten ngawi selama tahun 2005-2010 cenderung semakin menurun, dan hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten ngawi dari tahun 2005 sampai 2010 rata-rata adalah sebesar 97,53%, artinya tingkat efisiensi masih kurang karena hasilnya kurang dari 100%.

Penelitian ini dilakukan oleh Julastiana (2011) mengenai tentang Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten klungkung. Hasil analisis data menunjukkan, tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 70,97 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 112,36 persen.

Penelitian ini dilakukan oleh Mentari (2012) tentang Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian kemampuan keuangan kota malang mengalami kecendrungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecendrungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Puspita Jayati (2008) tentang Reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang menekankan penyusunan anggaran berbasis kinerja, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan standar pelayanan publik. Faktor-faktor pendukungnya yaitu adanya peraturan

yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yakni BPKAD Kota Malang, adanya SOP, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor yang menghambat diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan memenuhi sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Riswanto (2016) tentang Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasil penelitian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember; Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Basukianto (2015) tentang Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan. Hasil penelitian adalah Kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) tentang Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian adalah Penyebab LKPD Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan opini *disclaimer* karena

adanya kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan SAP, terbatasnya sumber daya manusia yang handal, tidak adanya inventarisasi aset serta hutang maupun piutang daerah dan lemahnya SPIP serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Penelitian yang dilakukan Pujiswara (2014) tentang Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi Keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan Akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Keempat, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Masita (2014) tentang Analisis kinerja keuangan daerah Di provinsi sulawesi utara tahun 2007-2012. Hasil penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau

belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. II Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Novelya Suoth, Jantje Tinangon, Sintje Rondonuwu (2016)	Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan	Metode Deskriptif	Kinerja Keuangan pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
2	Eko Santoso (2011)	Efisiensi dan efektivitas pengelolaan	Penelitian deskriptif bersifat studi	Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan

		keuangan daerah di kabupaten ngawi	kasus yang dikaji secara kuantitatif	daerah di kabupaten ngawi selama tahun 2005-2010 cenderung semakin menurun, dan hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten ngawi dari tahun 2005 sampai 2010 rata-rata adalah sebesar 97,53%, artinya tingkat efisiensi masih kurang karena hasilnya kurang dari 100%.
3	Yaneka Julastiana, I Wayan Suartana (2011)	Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten klungkung	Metode Kuantitatif	Hasil analisis data menunjukkan, tingkat efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 70,97 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 tergolong sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 112,36 persen.
4	Mentari yosephen sijabat, choirul saleh, abdul wachid (2008-2012)	Analisis kinerja keuangan Serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah	Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Kemampuan keuangan kota malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio dof 13,67% dan ikr 18,01%. Kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecenderungan

				<p>peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas pad 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio pad, pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan silpa setiap tahun semakin meningkat.</p>
5	<p>Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin, Abdul Wachid (2008)</p>	<p>Reformasi pengelolaan keuangan daerah Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Pemerintah Kota Malang menekankan penyusunan anggaran berbasis kinerja, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penetapan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), dan standar pelayanan publik. Faktor-faktor pendukungnya yaitu adanya peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yakni BPKAD Kota Malang, adanya SOP, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor yang menghambat diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan</p>

				memenuhi sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.
6	Natak Riswanto (2016)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember; Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
7	Febrian Cahyo Pradono, Basukianto (2015)	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan	Metode ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data.	Kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.

8	Herdi Setiawan, Tri Sukirno Putro (2013)	Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah	Metode pendekatan kualitatif	Penyebab LKPD Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan opini <i>disclaimer</i> karena adanya kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang belum sesuai dengan SAP, terbatasnya sumber daya manusia yang handal, tidak adanya inventarisasi aset serta hutang maupun piutang daerah dan lemahnya SPIP serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
9	Ida Bagus Pujiswara, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi Keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah Terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan Akuntabilitas pemerintah daerah	Penelitian yang dilakukan bersifat Asosiatif	ini menunjukkan bahwa: Pertama, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah

				daerah. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Keempat, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.
10	Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014)	Analisis kinerja keuangan daerah Di provinsi sulawesi utara tahun 2007-2012	Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif.	Kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

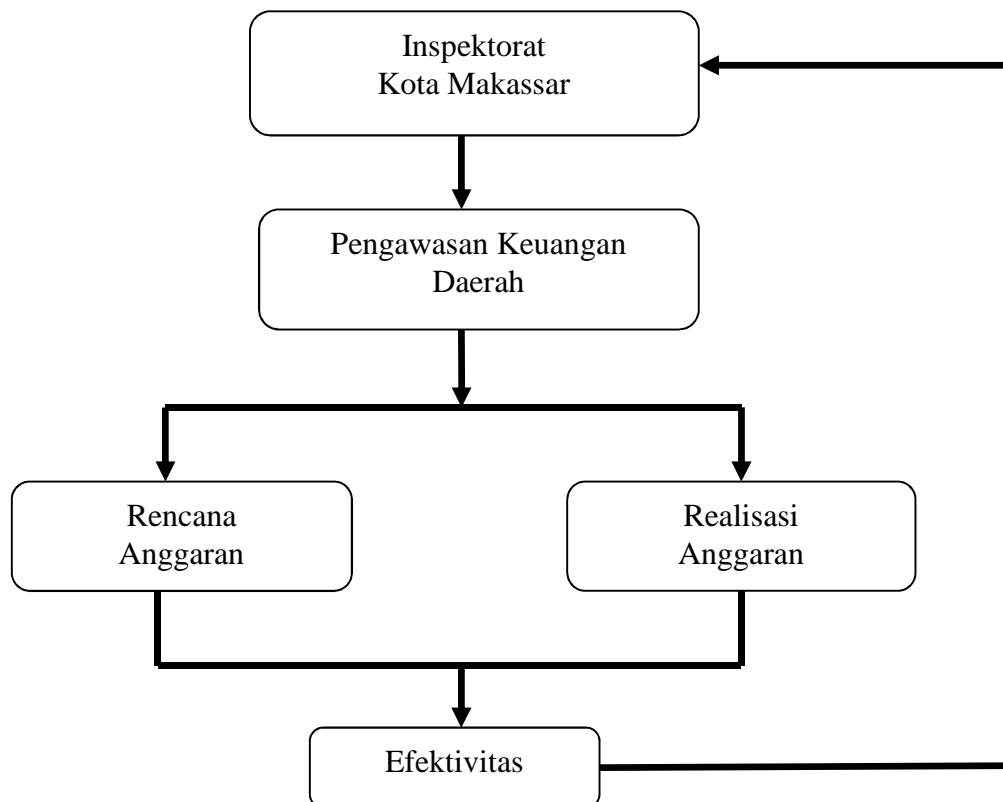
H. Kerangka Pikir

Inspektorat kota Makassar adalah suatu badan (lembaga) yang merupakan bagian dari lembaga pemerintahan kota Makassar yang dibentuk untuk melakukan pengawasan umum pembangunan daerah kota Makassar, termasuk pengawasan

bidang keuangan. Luasnya struktur pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap pengawasan, keuangan.

Berdasarkan kerangka pikir yang diajukan dan efektifnya penelitian ini, maka penulis melakukan batasan dengan memfokuskan penelitian ini pada pengawasan keuangan daerah khususnya terhadap anggaran belanja Kota Makassar. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasannya, maka penelitian penulis tertuju pada rencana pengawasan dan realisasi pengawasan untuk kemudian dilakukan analisis dan pengukuran efektivitas. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini, maka penulis menggambarannya dalam bentuk bagan, berikut :

Kerangka Pikir



I. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah dikemukakan maka penulis berhipotesis, antara lain : Diduga bahwa pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar sudah dilaksanakan secara efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dan tertuju pada badan (lembaga) terkait, yakni Inspektorat kota Makassar. Sedangkan waktu yang telah digunakan untuk melakukan penelitian ini selama dua bulan yaitu pada bulan April - Mei 2017.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

1. Jenis Data, yaitu :

Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dan laporan-laporan.

2. Sumber Data, terdiri dari :

- 1) Data Sekunder, data ini diperoleh melalui hasil pengumpulan informasi dari pihak terkait dalam hal ini badan atau lembaga-lembaga terkait.
- 2) Data time series, data ini diperoleh melalui nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu (misal; hari, minggu, bulan, tahun).

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku dan macam media penulisan lainnya yang ilmiah, dimaksudkan untuk menambah referensi pendukung tentang teori-teori

ilmiah yang dapat berkaitan dengan topik penelitian dalam rangka penyusunan laporan.

2. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah dengan cara bagaimana melakukan studi komparatif atau melakukan pendekatan-pendekatan pada objek penelitian, diantaranya, metode observasi, suatu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada badan (lembaga) tersebut.
3. Dokumen perusahaan. Data ini adalah data anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

D. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif Kualitatif, digunakan untuk menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar.
2. Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Berikut rumusan rasio efektivitas pengawasan keuangan daerah yang digunakan.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pengawasan}{Rencana\ Pengawasan} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Inspektorat Kota Makassar

Kantor Inspektorat Kota Makassar, adalah suatu badan instansi pemerintah yang berada di daerah Kota Makassar dan terletak di Perumahan Griya Fajar Mas Jl. Teduh bersinar No. 7 Makassar. Inspektorat Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar. Kedudukan Inspektorat Kota Makassar yaitu Inspektorat Kota Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan walikota di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi inspektorat kota Makassar yaitu: Penyusunan kebijaksanaan teknis pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Penyusunan kebijaksanaan teknis pengusutan terhadap kebenaran laporan/pengaduan penyimpangan wewenang pada unit kerja.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan profesional”.

2. Misi

Misi inspektorat daerah kota makassar adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya pengawasan internal pemerintah Kota Makassar yang efektif”.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah.
- b. Menyusun, mengembangkan sistem mekanisme pengelolaan keuangan daerah di kota makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan administrasi keuangan bagi para pengguna anggaran secara cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan pendapatan daerah kota makassar.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian administrasi umum
 - b. Sub bagian program dan perencanaan
 - c. Sub bagian pelaporan dan evaluasi
3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Peralatan dan Kekayaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Aparatur dan Kesatuan Bangsa.

Secara teknis, stuktur organisasi inspkorat kota makassar digambarkan dalam struktur bagan sebagai berikut:

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Kota Makassar

Inspektorat kota Makassar melakukan pengawasan di beberapa kantor dinas diantaranya :

1. Dinas pendidikan kota makassar
2. Dinas kesehatan kota makassar
3. Dinas sosial kota makassar
4. Dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal
5. Dinas pengelolaan kebersihan kota makassar
6. Dinas perhubungan kota makassar
7. Dinas tenaga kerja kota makassar
8. Dinas pekerjaan umum kota makassar
9. Dinas kebudayaan dan pariwisata kota makassar
10. Dinas catatan sipil kota makassar

Inspektorat kota Makassar dalam melakukan pengawasan keuangan daerah maka tentunya program/kegiatan pemeriksaan yang dilakukan tidak terlepas dari program/kegiatan pengelolaan/belanja. Adapun anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meliputi :

- 1) Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang di anggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan(dia bekerja/produktivitas dan berkaitan dengan tujuan organisasi).
 - b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, dan perawatan kendaraan bermotor.
 - c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya.
- 2) Belanja Tidak Langsung, adalah belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Terdiri :
- a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga, digunakan untuk menggambarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

B. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan keuangan daerah yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan apakah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas daerah SKPD
2. Melakukan pemeriksaan apakah transaksi pengeluaran/pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah dilakukan berdasarkan Surat penyediaan Dana atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Melakukan pemeriksaan transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa
4. Melakukan transaksi penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana dan pelaksanaan pembayaran. Apakah telah sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Adapun untuk melengkapi data analisis pengawasan pemeriksaan di Inspektorat Kota Makassar, maka data yang akan disajikan dalam

penelitian ini adalah data untuk tiga tahun Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung)

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	70.026.316.500	70.026.316.500	70.026.316.500	70.026.316.500	280.105.266.000	0 %
2014	70.236.395.449,5	70.236.395.449,5	70.236.395.449,5	70.236.395.449,5	280.945.581.798	0,30 %
2015	70.657.814.059,5	70.657.814.059,5	70.657.814.059,5	70.657.814.059,5	282.631.256.238	0,6 %
Total	210.920.526.009	210.920.526.009	210.920.526.009	210.920.526.009	843.682.104.036	$\bar{X} = 0,3 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.1, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 280.105.266.000, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 280.945.581.798, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 282.631.256.238, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 0,3 % pertahunnya.

Tabel 5.2
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung)

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	1.062.160.000	1.062.160.000	1.062.160.000	1.062.160.000	4.248.640.000	0 %
2014	1.147.132.800	1.147.132.800	1.147.132.800	1.147.132.800	4.588.531.200	8 %

2015	1.250.374.752	1.250.374.752	1.250.374.752	1.250.374.752	5.001.499.008	9 %
Total	3.459.667.552	3.459.667.552	3.459.667.552	3.459.667.552	13.838.670.208	$\bar{X} = 5,66 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.2, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (langsung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.248.640.000, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.588.531.200, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 5.001.499.008, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 5,66 % pertahunnya.

Tabel 5.3

**Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	8.082.194.000	0 %
2014	2.081.164.955	2.081.164.955	2.081.164.955	2.081.164.955	8.324.659.820	3 %
2015	2.164.411.553	2.164.411.553	2.164.411.553	2.164.411.553	8.657.646.212	4 %
Total	6.266.125.008	6.266.125.008	6.266.125.008	6.266.125.008	25.064.500.032	$\bar{X} = 2,33 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.3, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.082.194.000, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.324.659.820, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran

yang direncanakan sebesar Rp 8.657.646.212, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 2,33% pertahunnya.

Tabel 5.4
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Modal

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	2.576.170.000	2.576.170.000	2.576.170.000	2.576.170.000	10.304.680.000	0 %
2014	2.694.673.810	2.694.673.810	2.694.673.810	2.694.673.810	10.778.695.240	4,6 %
2015	2.856.354.238	2.856.354.238	2.856.354.238	2.856.354.238	11.425.416.954	6 %
Total	8.127.198.048	8.127.198.048	8.127.198.048	8.127.198.048	32.508.792.194	$\bar{X} = 3,53 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.4, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja modal. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 10.304.680.000, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 10.778.695.240, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 11.425.416.954, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 3,53% pertahunnya.

Tabel 5.5
Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung)

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	64.424.211.180	64.424.211.180	64.424.211.180	64.424.211.180	257.696.844.720.	0 %
2014	65.916.461.722.5	65.916.461.722.5	65.916.461.722.5	65.916.461.722.5	263.665.846.890	2.2 %

2015	68.538.079.637,5	68.538.079.637,5	68.538.079.637,5	68.538.079.637,5	274.152.318.550	3.9 %
Total	198.878.752.540	198.878.752.540	198.878.752.540	198.878.752.540	795.515.010.160	$\bar{X} = 2,03 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.5, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 257.696.844.720, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 263.665.846.890, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 274.152.318.550, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 2,03% pertahunnya.

Tabel 5.6
Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung)

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	892.214.400,-	892.214.400,-	892.214.400,-	892.214.400,-	3.568.857.600,-	0 %
2014	998.005.536,-	998.005.536,-	998.005.536,-	998.005.536,-	3.992.022.144,-	11,8 %
2015	1.187.856.000,-	1.187.856.000,-	1.187.856.000,-	1.187.856.000,-	4.751.424.000,-	19 %
Total	3.078.075.936,-	3.078.075.936,-	3.078.075.936,-	3.078.075.936,-	12.312.303.744,-	$\bar{X} = 10,26 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.6, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja pegawai (langsung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 3.568.857.600, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 3.992.022.144, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran

yang direncanakan sebesar Rp 4.751.424.000,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 10,26 % pertahunnya.

Tabel 5.7
Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	2.020.548.500	8.082.194.000	0 %
2014	2.081.164.955	2.081.164.955	2.081.164.955	2.081.164.955	8.324.659.820	5.3 %
2015	2.164.411.553	2.164.411.553	2.164.411.553	2.164.411.553	8.657.646.212	7,4 %
Total	6.266.125.008	6.266.125.008	6.266.125.008	6.266.125.008	25.064.500.032	$\bar{X} = 4,23 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.7, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.082.194.000, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.324.659.820, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.657.646.212, dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 4,23 % pertahunnya.

Tabel 5.8
Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Untuk Program Kerja Belanja Modal

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	2.318.553.000	2.318.553.000	2.318.553.000	2.318.553.000	9.274.212.000,-	0 %
2014	2.506.046.644	2.506.046.644	2.506.046.644	2.506.046.644	10.024.186.576,-	8 %

2015	2.770.663.810	2.770.663.810	2.770.663.810	2.770.663.810	11.082.655.240,-	10,5 %
Total	7.595.263.454	7.595.263.454	7.595.263.454	7.595.263.454	30.381.053.816,-	$\bar{X} = 6,16 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.8, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 9.274.212.000, sedangkan untuk tahun 2014 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 10.024.186.576, dan pada tahun 2015 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 11.082.655.240,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama tiga tahun tersebut sebesar 6,16 % pertahunnya.

Tabel 5.9

Gabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Uraian	Tahun			Perkembangan (%)
	2013	2014	2015	
Belanja Pegawai (Tidak langsung)	280.105.266.000	280.945.581.798	282.631.256.238	$\bar{X} = 0,3 \%$
Belanja Pegawai (langsung)	4.248.640.000	4.588.531.200	5.001.499.008	$\bar{X} = 5,66 \%$
Belanja barang dan jasa	8.082.194.000	8.324.659.820	8.657.646.212	$\bar{X} = 2,33 \%$
Belanja modal	10.304.680.000	10.778.695.240	11.425.416.954	$\bar{X} = 3,53 \%$
Total	306.989.420.000	304.637.468.058	307.715.818.412	$\bar{X} = 2,10 \%$

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.9, maka dapat dijelaskan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk setiap rencana belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) pada tahun 2013 sebesar Rp 280.105.266.000, pada tahun 2014 sebesar Rp 280.945.581.798, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 282.631.256.238, dengan perkembangan rata-rata sebesar (\bar{X}) =

0,3 %. Untuk belanja pegawai (langsung) tahun 2013 sebesar Rp 4.248.640.000, pada tahun 2014 sebesar Rp 4.588.531.200 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 5.001.499.008, dengan perkembangan rata-rata sebesar (\bar{X}) = 5,66 %. Kemudian untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2013 sebesar Rp 8.082.194.000, pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.324.659.820, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 8.657.646.212, dengan perkembangan rata-rata sebesar (\bar{X}) = 2,33 %. Sedangkan Untuk rencana belanja Modal sebesar Rp 10.304.680.000 pada tahun 2013, Rp 10.778.695.240 pada tahun 2014, dan Rp 11.425.416.954 pada tahun 2015, dengan perkembangan rata-rata sebesar (\bar{X}) = 3,53 %.

Tabel 5.10
Gabungan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Uraian	Tahun			Perkembangan (%)
	2013	2014	2015	
Belanja Pegawai (Tidak langsung)	257.696.844.720	263.665.846.890	274.152.318.550	\bar{X} = 2,03 %
Belanja Pegawai (langsung)	3.568.857.600	3.992.022.144	4.751.424.000	\bar{X} = 10,26 %
Belanja Barang dan Jasa	7.193.152.660	7.575.440.800	8.138.176.000	\bar{X} = 4,23 %
Belanja Modal	9.274.212.000	10.024.186.576	11.082.655.240	\bar{X} = 6,16 %
Total	277.733.066.980	285.257.496.410	298.124.573.790	\bar{X} = 5,67 %

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.10, maka dapat dijelaskan realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Makassar untuk setiap rencana belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) sebesar Rp 257.696.844.720 pada tahun 2013, Rp 263.665.846.890 pada tahun 2014, dan Rp 274.152.318.550 pada tahun 2015, dengan perkembangan rata-rata sebesar (\bar{X}) = 2,03 %. Untuk belanja pegawai (langsung) sebesar Rp

3.568.857.600 tahun 2013, Rp 3.992.022.144 pada tahun 2014 dan Rp. 4.751.424.000 pada tahun 2015, dengan perkembangan rata-rata sebesar $(\bar{X}) = 10,26 \%$. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 7.193.152.660 pada tahun 2013, Rp 7.575.440.800 pada tahun 2014, dan Rp 8.138.176.000 pada tahun 2015, dengan perkembangan rata-rata sebesar $(\bar{X}) = 4,23 \%$. Sedangkan Untuk rencana belanja modal sebesar Rp 9.274.212.000 pada tahun 2013, Rp 10.024.186.576 pada tahun 2014, dan Rp 11.082.655.240 pada tahun 2015, dengan perkembangan rata-rata sebesar $(\bar{X}) = 6,16 \%$.

Tabel 5.11
Gabungan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih Anggaran	
			(Rp)	(%)
2013	306.989.420.000	277.733.066.980	29.250.353.020	10,5 %
2014	304.637.468.058	285.257.496.410	19.379.971.648	6,7 %
2015	307.715.818.412	298.124.573.790	9.591.244.622	3,2 %
Total	919.342.698.470	861.115.137.190	58.227.561.280	6,7 %.

Sumber data : Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan tabel 5.11, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan anggaran dan realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, antara lain : Untuk tahun 2013 total rencana anggaran sebesar Rp 306.989.420.000, total realisasi anggaran sebesar Rp 277.733.066.980, dengan selisih anggaran sebesar Rp 29.250.353.020, atau sebesar 10,5 %. Kemudian untuk tahun 2014 total rencana anggaran sebesar Rp 304.637.468.058, total realisasi anggaran sebesar Rp 285.257.496.410, dengan selisih anggaran sebesar Rp 19.379.971.648, atau sebesar 6,7 %. Sedangkan untuk tahun 2015 total

rencana anggaran sebesar Rp 307.715.818.412, total realisasi anggaran sebesar Rp 298.124.573.790, dengan selisih anggaran sebesar Rp 9.591.244.622, atau sebesar 3,2 %. Berdasarkan besaran nilai anggaran pertahun tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa total rencana anggaran untuk tiga tahun anggaran tersebut sebesar Rp 919.342.698.470, dan total realisasi anggarannya sebesar Rp 861.115.137.190, dengan selisih anggaran sebesar Rp 58.227.561.280, atau sebesar 6,7 %.

C. Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah

Untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka analisis dan penilaian efektivitas ini dapat dilakukan untuk menentukan efektivitas pengawasan anggaran dari setiap tahun anggaran (2013,2014 dan 2015) dengan berpatokan pada tabel-tabel yang ada. Dalam menganalisis efektivitas pengawasan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Makassar, maka analisis efektivitas yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran kemudian dikali seratus persen, atau :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Rencana\ Anggaran} \times 100\%$$

Berikut analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja SKPD

kota makassar :

1. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar pada tahun 2013 yaitu :

Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{277.733.066.980}{306.989.420.000} \times 100 \\
 &= 91 \%
 \end{aligned}$$

2. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar pada tahun 2014 yaitu :

Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{285.257.496.410.}{304.637.468.058} \times 100 \\
 &= 94 \%
 \end{aligned}$$

3. Analisis efektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar pada tahun 2015 yaitu :

Analisis Eektivitas pengawasan anggaran SKPD Kota Makassar tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara total realisasi anggaran dengan total rencana anggaran dikali seratus persen, atau :

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{298.124.573.790}{307.715.818.412} \times 100 \\
 &= 97 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengawasan anggaran belanja (SKPD) Kota Makassar, maka dapat dilakukan penilaian efektivitas untuk menentukan tingkat efektivitas yang pengawasan yang dicapai oleh inspektorat kota makassar. Penilaian efektivitas pengawasan dilakukan berdasarkan kriteria efektivitas pengawasan keuangan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5. 12
Kriteria Efektivitas Pengawasan Keuangan

Presentase Efektivitas Pengawasan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif

80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Inspektorat kota Makassar (d disesuaikan)

Keterangan :

- 1) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif.
- 3) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 80% asampai 90% berarti cukup efektif.
- 4) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingan atau presentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria penilaian tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa efektifitas pengawasan anggaran belanja (SKPD) kota Makassar untuk masing-masing tahun anggaran , antara lain :

Untuk tahun 2013 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 91%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

Kemudian untuk tahun 2014 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 94%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

Sedangkan Untuk tahun 2015 hasil analisis pengawasan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat kota Makassar dengan angka persentase mencapai 97%, maka angka persentase pengawasan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Faktor yang mendukung pengawasan pelaksanaan SKPD di Kota Makassar adalah meliputi fasilitas yaitu sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Makassar yang bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan.
2. Bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar terhadap anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun anggaran masing-masing 2013 sebesar 91%, kemudian ditahun 2014 sebesar 94%, dan ditahun 2015 sebesar 97% sehingga dapat dikatakan telah mencapai kriteria Efektif.

B. Saran

1. Untuk Pimpinan Bawasda/Inspektorat kota Makassar selaku toop leader agar lebih meningkatkan efektivitas pengawasan khususnya pengawasan keuangan daerah, dengan meningkatkan mutu kinerja pegawai Inspektorat kota Makassar.
2. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat memperoleh informasi yang lebih efektif lagi Jadi, penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat

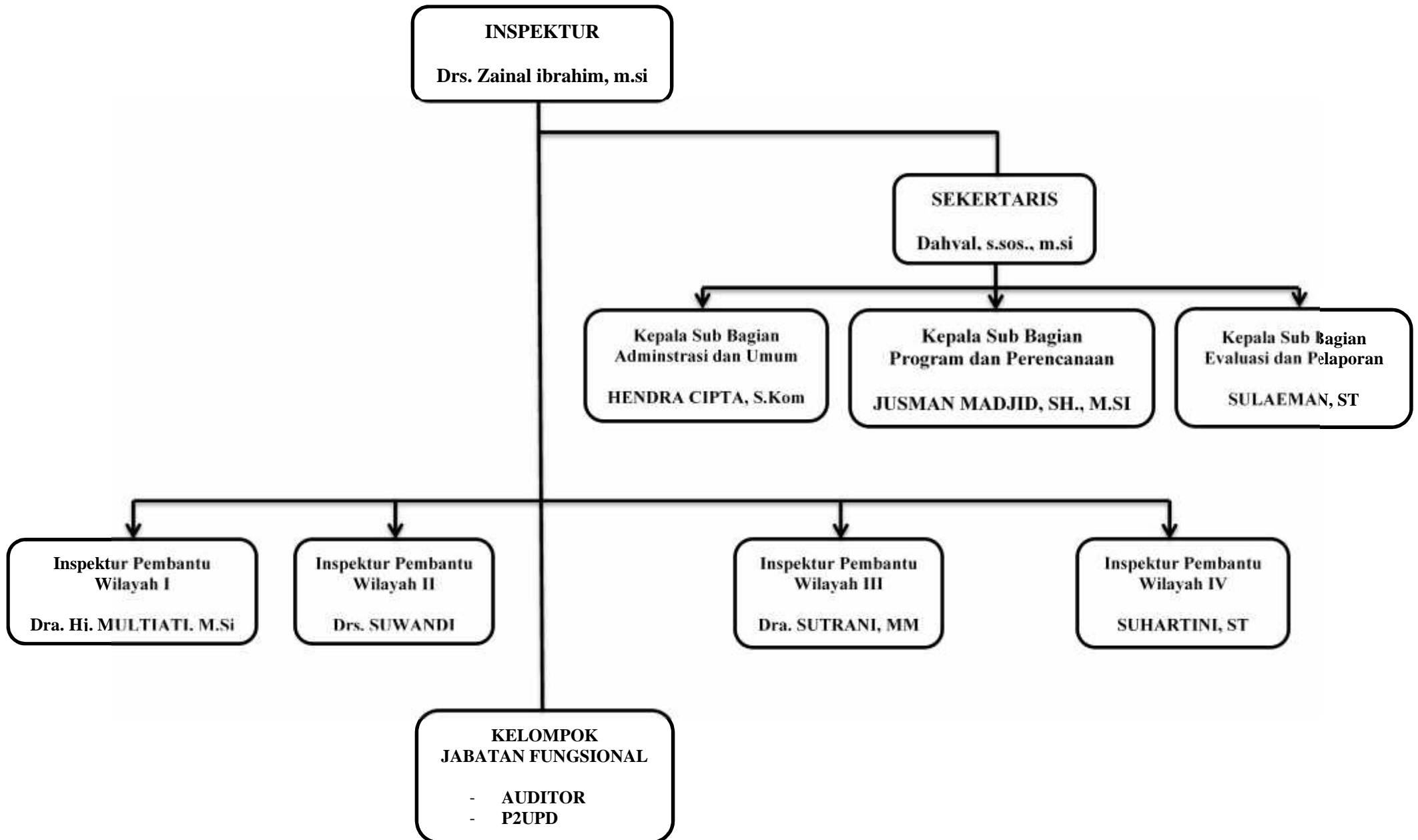
menambah responden atau informan untuk menggali banyak informasi mengenai efektivitas pengawasan keuangan daerah pada pemerintah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Absa, Yusuf. 2010. “Efektivitas Kerja dalam Proses Administrasi”
<http://yusufabsa.blogspot.co.id/2010/12/efektivitas-kerja-dalam-proses.html>.
- Basukianto. (2015). “Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).
- Echols M.J, dan Shadli H. 2008. *Kamus inggris – Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. “Manajemen Keuangan Sektor Publik”. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim A. 2008. “Manajemen Keuangan Daerah”. Edisi Revisi. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2008. “Akuntansi Keuangan Daerah”. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap S.S. 2009. “Sistem Informasi Manajemen (management control system)”. Penerbit Quantum, Jakarta.
- Julastiana, Yaneka. 2011. “Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten klungkung”. Bali : Universitas Udayana.
- Kumpulan Peraturan Daerah. 2006. UU 33/2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerbit Deka Mandiri, Jakarta.
- Munir D., Djuanda H.A, dan Tangkisan H.N.S. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Mamesah dan Halim. 2012. “Kinerja Keuangan Daerah”.
<http://eprints.ung.ac.id/4653/6/2012-1-62201-241408079-bab2-13082012112859.pdf>.
- Mahmudi. 2008. “Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Machmud, Masita. 2014. “Analisis kinerja keuangan daerah di provinsi sulawesi utara tahun 2007-2012”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasoa, Rizky. 2014. "*Pengertian dan fungsi pengawasan*". <https://rizkypasoa.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html>.
- Pusdiklatwas. 2011. "*Definisi Keuangan Daerah*". <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf>.
- Pujiswara, Bagus Ida. 2014. "*Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah*". Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Rondonuwu, Sintje. 2016. "*Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan*". Jurnal EMBA.
- Riswanto, Natak. 2016. "*Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*". Universitas Jember (UNEJ).
- Sodang dan Abdurahmat. 2008. "*Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori*". <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>.
- Santoso, Eko. 2011. "*Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten ngawi*". Surakarta : Universitas sebelas maret.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2008. "*Reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas*". Jurnal Administrasi Publik (JAP).
- Setiawan, Herdi. (2013). "*Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah*". Jurnal Kebijakan Publik.
- Williams C. 2009. "*Manajemen*". Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wachid, Abdul. 2012. "*Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*". Jurnal Administrasi Publik (JAP).



D. Job Discription

Tugas dan fungsi jabatan pada kantor Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

1. Inspektur.

Tugas dan fungsi inspektur pada pasal 7 yaitu;

1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan
- c. pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan
- d. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan
- f. pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan urusan rumah tangga inspektorat
- g. pembinaan kelembagaan, jabatan fungsional auditor dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Bagian tata usaha

Tugas dan fungsi bagian tata usaha pada Pasal 8 adalah:

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan
 - b. menghimpun, mengirim dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional pengawasan; menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
 - c. menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga
 - e. melaksanakan administrasi jabatan fungsional.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Pasal 9 yaitu:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang masing-masing

dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok dengan tugas pokok melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan daftar materi audit
 - b. perumusan dan penyusunan program kerja audit
 - c. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan audit
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Inspektur

Pasal 10 Perda Nomor 7 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan pada instansi pemerintah dan masyarakat umum.

Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal (2) ditetapkan bahwa penempatan Pejabat Fungsional Auditor ke dalam Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

4. Sub-sub Bagian.

1) Sub Bagian Perencanaan/Program

Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, merencanakan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia, menghimpun peraturan dan mendokumentasikan data pengawasan. Untuk melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan/program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan.
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan peningkatan sumberdaya manusia aparatur pengawasan.
- g. Menghimpun peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- h. Mengolah dan mendokumentasikan data - data hasil pengawasan.
- i. Memberikan saran kepada kepala bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi

Sub bagian pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak lanjut serta melaksanakan pengadministrasian pengaduan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub bagian pelaporan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Melaksanakan penyusunan evaluasi kegiatan pengawasan
- f. Mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak Lanjut
- g. Mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan masyarakat
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pengawasan
- i. Memberikan saran pada kepala bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan pelengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan tugas, Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah (RKSKPD)
- f. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana Anggaran satuan kerja dan dokumen anggaran Satuan kerja masing-masing sub bagian sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda

- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkup inspektorat dalam pengelolaan ketatausahaan
- i. Melaksanakan Administrasi ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi Administrasi perjalanan dinas dan urusan rumah tangga dinas
- j. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian meliputi formasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pension, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penusunan anggaran , penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan dalam pelaksanaan urusan keuangan
- l. Melaksanakan pengelolaan Administrasi perlengkapan pengadaan, pendistribusian barang inventaris dinas dalam pelaksanaan urusan perlengkapan
- m. Memberikan saran pada kepala bagian tata usaha berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

RIWAYAT HIDUP



Samsidar, lahir di Kalitata Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 05 Januari 1996. Penulis adalah anak Pertama dari empat bersaudara, buah hati dari Abd. Manaf dan Irmawati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 157 Kalitata Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2007. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama juga, Penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 2 Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan Berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada tahun 2013.

Berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang Penulis dalam mengikuti pendidikan diperguruan tinggi dapat berhasil dengan terkhususnya skripsi ini.